

## Pengaruh Faktor Politik dalam Pengungkapan Transparansi Informasi Website Pemerintah Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan Bali Periode 2017-2020

Mega Mistika<sup>1\*</sup>, Deviani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

\*Korespondensi: [megamistika00@gmail.com](mailto:megamistika00@gmail.com)

---

**Tanggal Masuk:**

7 Februari 2023

**Tanggal Revisi:**

5 Mei 2023

**Tanggal Diterima:**

21 Juni 2023

---

**Keywords:** *Transparency;  
Political Competition;  
Political Strength.*

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Mistika, Mega & Deviani (2023). Pengaruh Faktor Politik dalam Pengungkapan Transparansi Informasi Website Pemerintah Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota Pulau Jawa dan Bali Periode 2017-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (3), 952-962.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.825>

---



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

**Abstract**

*This research aims to determine the effect of political factors such as political strength and political competition level on transparency information of local government websites in Java and Bali. The sampling techniques used was purpose sampling with a total of 122 local government websites using multiple linear regression with the help of IBM SPSS 23 software. This result shows that political strength and political competition level does not affect the transparency of local government. There is no effect on transparency when the pressure from public and political party were high. In addition, people must remain wary of information from local government to hold them accountable.*

### PENDAHULUAN

Masyarakat secara umum telah mengatur kehidupannya dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi keterbatasan sumber daya, maupun keterbatasan cara dalam pendistribusian sumber daya tersebut dengan baik. Oleh karena itu politik digunakan untuk mempermudah pendistribusian hal-hal tersebut karena politik dapat diartikan sebagai usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Politik dalam pemerintahan merupakan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh petinggi suara daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya. Politik pada umumnya juga dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh masyarakat dengan tujuan untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis. Kontribusi masyarakat juga dibutuhkan dalam hal pemerintahan tersebut baik secara struktur sosial, politik maupun ekonomi sebagai pengawas langsung agar pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kewajiban dan wewenang mereka dalam mengatur sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka sebelumnya.

Transparansi pada pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam menemukan apa yang terjadi dalam organisasi sektor publik dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mempublikasikan informasi secara proaktif dalam situs resmi (*website*) pemerintah daerah. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah mengembangkan peraturan dan kebijakan ketika mulai digalakkannya transparansi dengan penetapan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tujuan diberlakukannya peraturan ini salah satunya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat agar berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik berupa pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, sebagai upaya memperkuat regulasi tersebut, pemerintah Kembali menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188,52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, yang menugaskan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam *website* resmi masing-masing daerah. Kemudian Presiden Republik Indonesia Kembali mengeluarkan Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta diperkuat dengan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Dalam lampiran yang tertera pada Inpres No. 7 Tahun 2015 tersebut dijelaskan berbagai Tindakan yang dapat dilakukan sebagai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya dibidang pelaksanaan *e-government* dan kebutuhan informasi publik. Dengan diberlakukannya inpres ini diharapkan pelaksanaan komunikasi antara pemerintah dan public dapat terlaksana dengan baik, sehingga informasi tersebut dapat tersalurkan dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa literatur yang membahas pengungkapan transparansi di Indonesia mengungkapkan bahwa transparansi publik oleh pemerintah daerah masih relatif rendah. Irwan Taufiq Ritonga dan Syamsul (2016) menyatakan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah, yakni hanya sebesar 16,84%. Martani, Nastiti & Wicaksono (2014) juga menyatakan nilai rata-rata publikasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah melalui *website* dalam sepuluh tahun implementasi *e-government* masih rendah, meskipun telah ditetapkannya berbagai kebijakan yang mendasari kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi, serta pembentukan *website* pemda sebagai media untuk mempermudah penyampaian informasi tersebut kepada publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa tingkat transparansi informasi, khususnya melalui *website* pemda masih sangat rendah meskipun aturan dan kebijakan sudah diterbitkan sejak lama.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiputra (2018) menjelaskan bahwa lingkungan politik merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan transparansi pada tingkat pemerintah daerah. Kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam mencapai tujuannya sering bertentangan satu sama lain, sehingga sering terjadi konflik kepentingan, baik antara sesama pejabat politik maupun dengan masyarakat atau publik. Para pengamat politik setuju bahwa hal tersebut dapat terjadi apabila para pejabat memiliki kekuatan atau kekuasaan pada suatu wilayah tertentu.

Tekanan untuk menjadi lebih transparan bagi pemerintah daerah juga diakibatkan oleh persaingan public terkait dengan pengawasan kegiatan antar partai. Berliner & Erlich (2015) menyatakan bahwa kompetisi politik berperan penting dalam mengadopsi reformasi institusi dengan melakukan peningkatan akses informasi. Ketika tingkat kompetisi politik yang terjadi dalam pemerintahan rendah atau terdapat partai yang dominan dalam suatu pemerintahan, politisi yang menjabat cenderung merasa aman dengan posisinya sehingga merasa tidak perlu untuk mengungkapkan informasi lebih banyak. Sebaliknya, apabila tingkat kompetisi politik semakin ketat atau tidak terdapat partai yang dominan dalam suatu pemerintahan, maka hal

tersebut menjadi insentif untuk menunjukkan tindakan dan manajemen partai politik yang berkuasa sehingga transparansi perlu ditingkatkan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Heald (2006) dan Roberts (2006b) menunjukkan bahwa transparansi memiliki efek positif atas persepsi publik terhadap pembuat keputusan maupun hasil keputusan politik tersebut. Transparansi tersebut merupakan reorientasi dari pengambilan keputusan yang dinilai dapat meningkatkan legitimasi organisasi atau pemerintah daerah. Transparansi dapat meningkatkan rasa kontrol masyarakat terhadap para pejabat dengan cara membuat politisi tersebut bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka, sehingga dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap keputusan yang diinginkan oleh publik. Transparansi menjadi sumber penting bagi masyarakat dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan public, meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi korupsi, dan menjamin pejabat untuk bertanggung jawab atas aksi serta output dari tindakan atas kebijakan yang dibentuk.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekuatan politik dan kompetisi politik terhadap transparansi informasi khususnya melalui *website* resmi pemerintah daerah kabupaten/kota Pulau Jawa dan Bali untuk periode 2017-2020. Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor politik, yakni kekuatan politik dan kompetisi politik terhadap transparansi informasi yang dipublikasikan melalui *website* resmi pemda daerah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak akademisi, pemerintah daerah khususnya pemda yang diteliti, serta tambahan informasi bagi masyarakat mengenai faktor politik yang mempengaruhi pengungkapan transparansi informasi.

## **REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### ***Legitimacy Theory***

Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi terus berusaha untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batasan-batasan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Batasan dan norma tersebut bersifat tidak tetap, tetapi akan berubah seiring berjalannya waktu, sehingga mengharuskan organisasi untuk selalu responsif. Teori legitimasi dalam konteks pemerintahan merupakan suatu kondisi dimana pemerintah bertindak sesuai dengan batasan, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Legitimasi merupakan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan budayanya (Mayer & Scott, 2009). Teori legitimasi digunakan dalam pembenaran mengapa pemerintah harus mempublikasikan informasi pemerintahan melalui *website* resmi dari masing-masing pemerintahan daerah. Deegan *et al.*, (2000) menyatakan bahwa teori legitimasi didasari dari pemahaman atas kontrak sosial antara institusi sosial dan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membuat pengungkapan informasi dengan memanfaatkan suatu media yakni *website* resmi masing-masing pemerintah daerah (Sinaga, 2011).

### **Transparansi Informasi Pemerintah**

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa transparansi bermakna keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi pemerintahan adalah kemampuan untuk menemukan apa yang sedang terjadi dalam organisasi publik dengan berbagai cara, seperti pertemuan terbuka (*open meetings*), pengaksesan dokumen, postingan yang diunggah pada *website*, perlindungan terhadap para *whistle-blower*, dan bahkan informasi ilegal yang bocor (Piotrowski-Ryzin, 2007). Transparansi ini mengacu pada ketersediaan informasi mengenai pemerintahan yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah daerah.

Transparansi adalah sarana untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, administrasi dan manajerial, dengan cara melakukan urusan publik secara terbuka dan memaparkannya pada pengawasan publik (Birkinshaw, 2006).

### **Kompetisi Politik**

Kompetisi politik adalah tingkat daya saing antar partai politik untuk menduduki calon politisi yang diusungnya agar dapat menduduki suatu jabatan strategis pada pemerintahan. Kompetisi politik memiliki keterkaitan dengan pengawasan kegiatan antar partai sehingga partai tersebut dituntut untuk lebih transparan. Ketika persaingan politik rendah, politisi memiliki ekspektasi harapan yang tinggi untuk tetap berkuasa dan cenderung kurang transparan serta mengabaikan janji-janji saat pemilu mereka. Caba-Perez *et al.*, (2014) menyatakan tingkat persaingan politik yang lebih tinggi merupakan insentif untuk menunjukkan tindakan dan manajemen yang dilakukan oleh partai politik yang berkuasa dalam meningkatkan transparansi. Di sisi lain, kompetisi politik yang lebih tinggi dapat diartikan bahwa kelompok partai politik yang memegang kendali memiliki resiko lebih besar dalam bentuk membocorkan informasi, yang mana pengungkapan informasi yang lebih banyak tersebut dapat melemahkan posisi partai atau mengurangi untuk mengontrol maksud informasi yang ingin disampaikannya. Dalam situasi persaingan yang rendah, pihak yang dominan mungkin lebih banyak percaya diri dengan posisi kekuasaan mereka, sehingga menyebabkan lebih beresiko membocorkan informasi.

### **Kekuatan Politik**

Kekuatan politik memiliki fungsi sebagai suatu sistem kepercayaan yang menerangkan dan membenarkan suatu tatanan politik yang dimiliki oleh pejabat berkuasa, yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk mencapainya. Kekuatan politik berperan sebagai senjata politik yang dimiliki oleh pejabat pemerintah daerah atas kekuasaan dan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan. Kekuatan politik ini penting dimiliki untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses pemerintahan. Persaingan antara partai-partai yang tergabung dalam koalisi mengarah pada keinginan untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh partai lain yang mungkin menjadi lawan pemilu di masa depan dengan meningkatkan transparansi. Dalam konteks politik pemerintahan, kekuatan politik memberikan pejabat daerah yang mempunyai kekuasaan terhadap daerah tersebut dengan cara memperoleh kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh pihak bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, pihak yang memiliki kekuatan politik lebih unggul dalam proses perumusan kebijakan terkait pemerintahan

### **Pengaruh Kompetisi Politik Terhadap Transparansi Informasi Melalui *Website* Pemda**

Araujo & Tejedro-Romero (2016a) menyatakan bahwa persaingan politik memiliki keterkaitan dengan pengawasan kegiatan antar partai dan tekanan untuk lebih transparan. Terdapat dua pandangan yang berbeda terhadap persaingan politik dan transparansi informasi pemerintah daerah. Ketika kompetisi politik rendah atau terdapat partai yang dominan, politisi cenderung merasa tidak perlu melakukan pengungkapan informasi lebih banyak karena merasa posisinya sudah aman. Sebaliknya, apabila semakin ketat kompetisi politik atau tidak terdapat partai yang dominan, menyebabkan bertambahnya insentif untuk menunjukkan tindakan dan manajemen partai tersebut. Grimmelikhuijsen & Welch (2012) menyatakan bahwa semakin ketat atau tinggi kompetisi politik, maka resiko dalam pengungkapan informasi yang mampu melemahkan posisi partai yang berkuasa juga semakin tinggi. Sehingga dalam situasi tingkat persaingan politik yang rendah, partai dominan

mungkin akan lebih merasa aman dengan posisinya sehingga cenderung untuk lebih membuka informasi. Berdasarkan paparan tersebut, hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>:** Kompetisi politik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan transparansi informasi melalui *website* pemerintah daerah.

### **Pengaruh Kekuatan Politik Terhadap Transparansi Informasi Melalui *Website* Pemda**

Penelitian yang dilakukan oleh Piotrowski & Van Ryzin (2007) menunjukkan bahwa kekuatan politik mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi dan transparansi walaupun dianggap masih ambigu. Kekuatan politik yang terbentuk dalam pelaksanaan pemerintahan akan memberikan keuntungan bagi pihak yang menjabat. Kekuatan politik tersebut memberikan kebebasan yang lebih luas bagi pejabat daerah dalam merumuskan kebijakan, termasuk dalam hal pengungkapan informasi apa saja yang dapat dipublikasikan maupun transparansi kepada publik. Dalam pemerintahan Indonesia yang menganut sistem multi partai, tidak terdapat partai yang memiliki suara mayoritas seperti yang terdapat pada pemerintahan di negara Spanyol. Dengan demikian, partai koalisi dan oposisi menjadi suatu keharusan. Semakin besar partai pendukung seorang kepala daerah, semakin tinggi perhatian masyarakat terhadap kinerja mereka. Karena tuntutan yang tinggi tersebut, masyarakat akan membutuhkan informasi sehingga mendorong keterbukaan informasi yang lebih besar. Berdasarkan paparan tersebut, hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>:** Kekuatan politik berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi informasi melalui *website* pemerintah daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkan data secara mandiri. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang diperoleh dari *website* pemda dan lainnya yang relevan. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 122 pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di Jawa dan Bali untuk periode 2017-2020.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumenter, yakni pengumpulan data sekunder berupa transparansi pada *website* komisi informasi dan *website* resmi pemda, kompetisi politik diperoleh pada *website* KPU masing-masing daerah, serta kekuatan politik diperoleh dari *website* resmi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Variabel independen dalam penelitian ini berupa kekuatan politik dan kompetisi politik. Kekuatan politik diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dengan kriteria diberi nilai 1 apabila kepala daerah didukung salah satu partai pemenang pemilu nasional, dan nilai 0 jika sebaliknya. Sementara variabel kompetisi politik diukur dengan cara menjumlahkan selisih persentase suara partai pemenang pemilu peringkat pertama dengan jumlah persentase suara partai pemenang pemilu peringkat kedua.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS 23 dalam memprediksi pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
Transparansi	122	0	10	5.00	2.999	-.037	.219
Kekuatan Politik	122	0	1	.38	.487	.514	.219
Kompetisi Politik	122	5	72	44.28	15.233	-.648	.219
Valid N (listwise)	122						

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah sampel penelitian (N) sebanyak 122 sampel untuk setiap variabel yang diteliti. Nilai minimum dari transparansi dan kekuatan senilai 0, sementara nilai minimum dari variabel kompetisi politik adalah 5. Sementara itu, nilai maksimum transparansi adalah 10, nilai maksimum dari kompetisi politik adalah 72, dan nilai maksimum kekuatan politik adalah 1. Nilai rata-rata secara keseluruhan variabel dependennya adalah 5,00 dengan nilai 2,999 untuk standar deviasinya. Untuk variabel kekuatan politik, nilai rata-ratanya adalah 0,38 dengan standar deviasi 0,487. Variabel kompetisi politik memiliki angka 15,233 untuk standar deviasinya dan 44,28 untuk nilai rata-ratanya.

**Uji Normalitas**

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
N	122
Most Extreme Differences Absolute	.103
Positive	.092
Negative	-.103
Test Statistic	.103
Asymp. Sig. (2-tailed)	.003 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)Sig.	.139 <sup>d</sup>
99% Confidence Interval	
Lower Bound	.130
Upper Bound	.148

Sumber: data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian normalitas tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi > 0,05 yakni sebesar 0,139 dan menandakan bahwa data nilai residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	5.757	.949		6.068	.000		
Kekuatan Politik	-.034	.584	-.006	-.059	.953	.930	1.075
Kompetisi Politik	-.017	.019	-.085	-.902	.369	.930	1.075

Sumber; data sekunder yang diolah, 2023

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* lebih dari  $> 0,10$  yakni 0,930 yang artinya data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Sementara itu, nilai *VIF* data tersebut didapatkan sebesar 1,075 dan menunjukkan bahwa juga tidak terjadi multikolinearitas karena bernilai lebih kecil dari  $< 10,00$ .

## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.532	.459		5.514	.000
	Kekuatan Politik	-.106	.282	-.036	-.377	.707
	Kompetisi Politik	.003	.009	.026	.278	.781

Sumber: data sekunder yang diolah, 2023

Dari data Tabel 4 dapat dilihat bahwa signifikansi (Sig.) variabel independen dengan variabel transparansi berada pada angka 0,707 untuk X1 dan 0,781 untuk variabel X2, yang mana angkanya lebih besar dari  $> 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pada variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

## Pengujian Hipotesis

### Uji F

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.700	2	3.850	424.655 <sup>b</sup>	
Residual	1080.300	119	9.078		
Total	1088.000	121			

Sumber: data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh sebesar 0,655 yang lebih besar dari nilai alpha 5% (0,05) dan menunjukkan bahwa variabel independen

secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa model fix digunakan untuk uji F statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sementara itu, nilai F hitung yang diperoleh pada uji F ini sebesar  $0,424 < 3,07$  yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari  $F_{tabel}$ . Data tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.084 <sup>a</sup>	.007	-.010

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Dari data Tabel 6 didapatkan nilai *R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0,026 atau sama dengan 2,6%. Agak tersebut mengindikasikan bahwa variabel kekuatan politik (X1) dan variabel kompetisi politik (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel transparansi (Y) sebesar 2,6%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar persamaan regresi ini atau dari variabel yang tidak diteliti.

### Uji T

**Tabel 7**  
**Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.757	.949		6.068.000	
Kekuatan Politik	-.034	.584	-.006	-.059	.953
Kompetisi Politik	-.017	.019	-.085	-.902	.369

Sumber; data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil olahan data statistic pada Tabel 7, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut. Pengujian Hipotesis 1 ( $H_1$ ) dalam penelitian ini, nilai Sig untuk variabel kompetisi politik sebesar  $0,369 > 0,05$ . Sementara itu nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kompetisi politik yang didapatkan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah 0,902. Data yang didapatkan pada uji t (*t test*) tersebut terhadap variabel kekuatan politik dengan transparansi menunjukkan angka 0,902 yang mana lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $< 1,9801$ ). Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_1$  bernilai negatif sebesar 0,085. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak yang berarti variabel kompetisi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel transparansi (Y) informasi pada *website* pemda.

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $Sig. < \alpha = 0,05$ . Nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha = 0,05$  adalah 1,9801. Untuk variabel kekuatan politik ( $X_2$ ) nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah 0,059 dan nilai signifikansinya adalah 0,953. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yakni  $< 1,9801$  dan nilai Sig  $0,059 > 0,05$ . Sementara itu, nilai koefisien  $\beta$  dari kekuatan politik ( $X_2$ ) adalah negatif 0,034. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan politik ( $X_2$ ) tidak berpengaruh dalam pengungkapan transparansi (Y) informasi pada *website* pemerintah daerah

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui *Website* Pemda**

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetisi politik yang terdapat dalam pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi pemerintah daerah. Hal ini menggambarkan bahwa persaingan yang terjadi sebelum, selama dan sesudah pemilu dilaksanakan tidak mempengaruhi proses pengungkapan transparansi informasi khususnya pada *website* pemda. Hasil ini sesuai dengan penelitian Grimmellikhuijsen & Welch (2012) yang menyatakan bahwa semakin ketat kompetisi politik, semakin tinggi resiko dalam pengungkapan informasi yang mampu melemahkan posisi partai penguasa. Dan sebaliknya, apabila terdapat partai yang dominan atau tingkat kompetisi politik rendah, partai tersebut merasa lebih aman dan lebih transparan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi yang bersifat fatal dan beresiko dalam melemahkan kekuasaan suatu partai juga semakin tinggi ketika tingkat kompetisi politik rendah. Tingginya tingkat kompetisi politik yang terjadi pada pemda yang berada di Pulau Jawa dan Bali untuk periode 2017-2020 tidak mempengaruhi bagaimana pihak pemda mempublikasikan informasi apa saja kepada masyarakat melalui *website* resmi pemda. Dalam kata lain, tingginya tingkat kompetisi yang terjadi, tidak menyebabkan pemda untuk meningkatkan transparansinya.

Tingkat kompetisi politik yang terdapat dalam susunan pemerintah daerah khususnya oleh para pejabat saat maupun sesudah pemilu dilakukan, membuat pihak tersebut berlomba-lomba untuk meningkatkan transparansi informasi hasil pemerintahannya sebagai upaya penarikan simpati bagi masyarakat. Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Araujo (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kompetisi politik terhadap transparansi informasi oleh pemerintah daerah.

### **Pengaruh Kekuatan Politik Terhadap Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui *Website* Pemda**

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan politik tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi pemerintah daerah. Hal ini tidak konsisten dengan Araujo & Tejedo-Romero (2015a) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kekuatan politik dengan transparansi. Penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kekuatan politik dengan tingkat pengungkapan transparansi informasi oleh pemerintah daerah pada kabupaten/kota Pulau Jawa dan Bali untuk periode 2017-2020.

Sistem multipartai yang dianut di Indonesia menyebabkan ketidak-efisienan dalam transparansi dikarenakan perbedaan sistem atau prosedur transparansi yang digunakan dalam pemerintahan yang dijalankan pejabat penguasa. Selain itu, pembagian kekuatan politik dengan partai terbesar pemenang pemilu atau pilkada serentak mungkin tidak sejalan dengan partai yang mendominasi pada pemda masing-masing. Kepala daerah mungkin saja didukung oleh partai-partai pemenang yang dominan dalam pemilu nasional, akan tetapi pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan berada pada legislatif daerah masing-masing.

Kekuatan politik dalam pemerintahan daerah tidak menyebabkan berkurangnya legitimasi pemerintahan tersebut pada masyarakat, dikarenakan sifat kekuatan politik itu yang hanya terjadi dalam lingkungan internal instansi. Pengungkapan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik yang dipegang oleh pejabat pemerintah terkait. Berdasarkan hal tersebut, tingkat kekuatan politik tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap transparansi informasi pemerintah daerah, khususnya pada *website* resmi pemerintah daerah untuk periode 2017-2020.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### Simpulan

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa beberapa hal sebagai berikut, tingginya tingkat kompetisi yang terjadi dalam proses pemerintahan daerah tidak mempengaruhi bagaimana proses pengungkapan transparansi khususnya melalui *website* resmi yang dilakukan pemerintah pada Pulau Jawa dan Bali untuk periode 2017-2020. Kekuatan politik yang menyokong pejabat pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan transparansi informasi melalui *website* resmi pemda kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa dan Bali untuk tahun periode 2017-2020. Pejabat pemerintah yang didukung oleh partai utama pemenang pemilu nasional dianggap tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam melaksanakan transparansi informasi melalui *website* pemda.

### Keterbatasan

Pada saat pengambilan data untuk proses penelitian, *website* pemda tidak secara keseluruhan dapat diakses dan seringkali informasi yang disediakan tidak diperbarui dengan baik, serta jumlah informasi yang dipublikasikan terbatas. Selain itu, ketersediaan data dalam *website* pemda seringkali hanya terdapat informasi atau data terkini, sehingga data yang dicari berupa data-data tahun sebelumnya cenderung tidak disajikan.

### Saran

Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan indeks transparansi yang lebih baik serta menggunakan metode *mixed method* dalam pengambilan data agar lebih efektif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel kontrol untuk mencegah perhitungan bias saat data dianalisis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123-138.
- Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedo-Romero, F. (2016a). Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 327-347.
- Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedo-Romero, F. (2015). Determinants of Local Governments Transparency in Times of Crisis: Evidence from Municipality-Level Panel Data. *Administration & Society Journal*, 1-28.
- Andiansyah. (2015). Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah: Kajian dan Teori. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Ball, Carolyn. (2009). What Is Transparency?. *Research Article*. Vol. 11, No. 4, 293-307.
- Bearfield & Bowman. (2016). Can You Find It on the Web? An Assessment of Municipal E-Government Transparency. *American Review of Public Administration*, 1-17.
- Berliner, D., & Erlich, A. (2015). Compering for Transparency: Political Competition and Institutional Reform in Mexican States. *American Political Science Review*, 109(1), 110-128.
- Brown, Noel and Deegan, C. (2012). The public disclosure of environmental performance information - a dual test of media agenda setting theory and legitimacy theory. *Accounting and Business Research*, 229 (1), 21-41.
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

- Cuadrado-Ballesteros, B., Frías-Aceituno, J., & Martínez-Ferrero, J. (2014). The role of media pressure on the disclosure of sustainability information by local governments. *Online Information Review*, 38(1), 114–135.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimizing effect of social and environmental disclosures - a theoretical foundation. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 15(3), 282-311.
- del Sol, D. A. (2013). The institutional, economic and social determinants of local government transparency. *Journal of Economic Policy Reform*, 16(1), 90–107.
- Gherghina, S. (2011). Does government performance matter? Electoral support for incumbents in six post-communist countries. *Contemporary Politics*, 17(3), 257–277.
- Instruksi Mendagri No.188.52/1797/SJ Tahun 2012 mengenai Transparansi Anggaran Daerah.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martani, D., Fitriyani, D., & Annisa. (2014). Financial and performance transparency on the local government websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 60(3), 504–516
- Martani, Dwi & Nastiti, Dian & Wicaksono, Panggah. (2014). Disclosure of Non-Financial Information about Public Services on the Official Website of Local Governments in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. 66. 500-512.
- Meijer, Albert J. (2012). Introduction to the special issue on government transparency. *International Review of Administrative Science*. 78(1), 3-9.
- Pina, Vicente & Torres, Lourdes. (2019). online Transparency and Corporate Governance in Spanish Governmental Agencies. *Online Information Review*. Vol. 43, No. 4, pp 635-675.
- Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). Citizen attitudes toward transparency in local government. *American Review of Public Administration*, 37(3), 306–323.
- Rizky, N. F. H., & Dul Muid. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pemerintah (Wilayah Provinsi Di Pulau Jawa). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.11, No.1, 1-7
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14. Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Ritonga, Irwan taufiq dan Syamsul. 2016. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Vol.20, No.2. Hal 110-126.
- Krah, R., & Mertens, G. (2020). Democracy and financial transparency of local governments in Sub-Saharan Africa. *Meditari Accountancy Research*, 28(4),681–699.
- Sutaryo dan Amanu, Kurniasari Tri, (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik atau Keuangan?. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. Vol 20, No. 1. Hal 43-60